

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Bettington, Jackie., Eberhard, K., Loo, R., & Smith, C. (2008). *Keeping Archives*. Australian Society of Archivists Inc.
- Dewi Wasdiana, M., & Setyadi, A. (n.d.). *ANALISIS SISTEM PENYIMPANAN DAN TEMU BALIK ARSIP INAKTIF BERKAS PERKARA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN*.
- Duranti, L., & Franks, P. C. (2015). *Encyclopedia of Archival Science*.
- Fatkhuriza, O., & Putra, P. (2024). Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 1–11.
- Herawan, L. (2020). Pemilihan Metode Penataan Arsip Inaktif Konvensional di Records Center Arsip Nasional Republik Indonesia. *Khazanah*, 132–156.
- Holmes, O. W. (1964). Archival Arrangement-Five Different Operations at Five Different Levels. In *Source: The American Archivist* (Vol. 27, Issue 1).
- Lundgren, T. D., & Lundgren, C. A. (1989). *Records Managements in The Computer Age*. Kent Publishing.
- Martono, B. (1994). *Penyusutan dan Program Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan*.
- Marzuki, P. Mahmud. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nurani, F. I. (2021). *Penataan Arsip Dinamis Inaktif Berkas Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Pangestuti, W. D. (2021). *Penyusutan Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.

- Parangu, R. N. A. (2016). *Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*.
- Pearce-Moses, Richard. (2005). *A glossary of archival and records terminology*. Society of American Archivists.
- Pratama, R. (2021). *METADATA, ARSIP, DAN INFORMASI: SUMBANGAN STANDAR-STANDAR KEARSIPAN TERHADAP KERANGKA DAN MODEL KERJASAMA KEILMUAN BIDANG-BIDANG SERUMPUN*.
- Rahayu, E. (2024). *Kegiatan Penataan Kembali Arsip Pengeboran Artesis Masa Kolonial Hindia Belanda di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan*. Universitas Gadjah Mada.
- Rosalin, S. (2017). *Manajemen Arsip Dinamis*. UB Press.
- Santosa, H. (1978). *MANAJEMEN ARSIP INAKTIF SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN ARSIP INAKTIF TIDAK TERATUR*.
- Sattar, S. (2019). *Manajemen Kearsipan*. Deepublish.
- Sholikhah, F., & Kumalaeni, D. (2017). *SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP): PENELUSURAN ARSIP BERKAS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG*. In *SIIP: Penelusuran Arsip ... Diplomatika* (Vol. 1, Issue 1). www.cdncouncilarchives.ca/
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Suparyanto, Y. (2018). *Hukum Perdata*. Penerbit Cempaka Putih.
- Wardah, M. (2016). *Pengelolaan Arsip Dinamis*. *Libria*, 8(1).
- Wirogioto, A. J. (2022). *Hukum Pidana*. Literasi Nusantara Abadi.



Peraturan

Indonesia. (2018). Keputusan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1264. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia (1952). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Penetapan Peraturan untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan. Lembaran Negara RI Tahun 1952 Nomor 73. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Buku I Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perkara Pidana dan Perdata. Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perkara Pidana. Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perkara Perdata. Mahkamah Agung RI.